

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dimensi diplomasi publik saat ini sudah bergeser dari komunikasi satu arah karena pengaruh globalisasi. Pemanfaatan diaspora sebagai sarana diplomasi publik sudah mulai dilakukan beberapa negara yang memiliki basis diaspora besar. Pemerintah Turki cepat menyadari potensi diasporanya yang tersebar karena berbagai peristiwa sejarah dan sudah membentuk lembaga khusus yang menangani diaspora dan berada di bawah perdana menteri. Melalui badan diasporanya, Turki telah berhasil melakukan berbagai program sosialisasi citra Turki ke berbagai kalangan di banyak negara. Kegiatan dan program dari badan diaspora Turki sejalan dengan kepentingan nasionalnya, terbukti dengan pembahasan dan perencanaan kebijakan strategis bersama antara pemerintah dan diaspora Turki. Indonesia, meskipun tidak memiliki basis diaspora sebesar India dan China, memiliki diaspora yang terikat secara emosional dengan Indonesia dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Melalui berbagai kegiatannya, diaspora Indonesia secara perlahan telah berhasil meningkatkan kualitas beberapa aspek kehidupan dan terbukti dapat mendukung pertahanan nirmiliter Indonesia. Dukungan terhadap pertahanan nirmiliter Indonesia berupa pengembangan kemampuan pertahanan nirmiliter yaitu kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah mulai menyadari pentingnya diaspora sebagai elemen diplomasi. Namun demikian, pemerintah belum bisa merangkul diaspora Indonesia sepenuhnya karena terkendala birokrasi dan pendanaan. Diaspora Indonesia sendiri berharap bahwa pemerintah akan lebih serius

dalam mengakomodasi keinginan diaspora untuk berbakti kepada Indonesia melalui pengesahan undang-undang dan pembentukan lembaga koordinator bagi diaspora Indonesia. Dari badan diaspora Turki, pemerintah dan diaspora Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran untuk kemudian dijadikan bahan pembahasan mengenai masa depan kebijakan dan program-program bagi diaspora Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan diaspora Indonesia belum terorganisir dengan baik karena struktur diaspora Indonesia masih bersifat perkumpulan dan sukarela. Badan diaspora Turki telah mampu membangun citra dan keterikatan dengan masyarakat internasional karena merupakan kepanjangan tangan pemerintah sehingga program dan kegiatan badan diaspora Turki dapat sejalan dengan kepentingan nasionalnya
- b. Perlu ada peran aktif dan total dari pemerintah untuk memberdayakan potensi diaspora Indonesia yang sangat besar sekali. Dapat dilihat sekarang, meskipun kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya didasarkan inisiatif diaspora, kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik.
- c. Meskipun tanpa kepastian dari pemerintah, diaspora Indonesia secara langsung dan tidak langsung mampu mendukung pertahanan nirmiliter melalui kegiatan-kegiatannya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoretis

Penelitian ini menyarankan untuk mengadakan penelitian lanjutan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi diaspora Indonesia sebagai elemen diplomasi publik. Jika memungkinkan, ada penelitian lanjutan yang membandingkan diaspora Indonesia dengan negara selain Turki. Penelitian lanjutan juga dapat membahas mengenai pentingnya pemerintah merumuskan legislasi,

membentuk badan khusus diaspora, serta pembenahan birokrasi yang menangani diaspora Indonesia secara lebih terperinci dan mendalam lagi.

5.2.2 Saran Praktis

Ada beberapa saran praktis dari penelitian ini yang meliputi saran pada tingkat strategis dan operasional. Pertama, pemerintah Indonesia perlu segera menyadari dan memahami akan potensi besar yang dimiliki diaspora Indonesia. Dengan demikian, segera dibentuk suatu kebijakan nasional dan atau perundang-undangan yang komprehensif mengenai status dan akses diaspora Indonesia. Kedua, peningkatan kemampuan adaptasi penyelenggara negara atas dinamika sosial global agar dapat membuat kebijakan-kebijakan strategis yang tidak harus selalu populis. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa orang-orang yang dipilih dalam jabatan tertentu adalah orang-orang yang berkompeten, berbekal ilmu pengetahuan dan wawasan di bidangnya, dan bukan berdasarkan masa bakti, kedekatan, maupun kepentingan politik.

Pada tingkatan operasional, Kementerian Luar Negeri perlu duduk bersama dengan IDN Global, IDF, dan IDBC guna mencoba merumuskan arah dari kegiatan-kegiatan diaspora yang banyak sekali dampaknya bagi pembentukan citra negara dan bangsa. Kemlu juga perlu membantu pendataan diaspora Indonesia melalui konsulat atau kantor perwakilan RI di negara lain. Dengan demikian, pengakuan atas keberadaan diaspora Indonesia secara hukum serta posisi diaspora dalam strata kewarganegaraan dapat segera dipastikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan dan badan atau lembaga lain dapat merumuskan bagaimana pertahanan nirmiliter negara Indonesia di masa depan, dengan memberdayakan elemen-elemen diplomasi dan *soft power*.